

Sakula Budaya
membuka jalan bagi anak-anak
kita untuk mengenal lebih dekat
kebudayaan mereka

Petak Danum
berkelanjutan di Desa

Tentang pemasaran produk unit
usaha Kelompok Tani di
Manuhing Raya: Pertanian dan
Perikanan

PANUTUNG TABUNG

Mampalawa Bulan Matanandau Pabelum Utus

Edisi XII Mei - Juli 2024

LIPUTAN KHUSUS

**Mafia Tanah
Semakin Membabi Buta**

**Pahewan & Kaleka
Kearifan Lokal Masyarakat
Dayak Ngaju Kalimantan Tengah**

**Hutan Adat Damang Batu
Segenggam Harapan
Masa Depan**



DARI REDAKSI 03

KABAR LEWU

14 PEGELARAN SENI SAKULA BUDAYA "HANDEP HAPAKAT" DESA SUMUR MAS



LIPUTAN KHUSUS

Mafia Tanah Semakin Membabi Buta

Jika kita berbicara tentang sistem penguasaan tanah di republik ini maka tentu tidaklah mungkin bisa dilepaskan dari konsep reforma agraria.

04



RUANG KEBUDAYAAN

SAKULA BUDAYA MEMBUKA JALAN BAGI ANAK-ANAK KITA UNTUK MENGENAL LEBIH DEKAT KEBUDAYAAN MEREKA

24

SANDÉHEN : Karungut Herlison, Mantir Desa Sumur Mas

27

INFORMASI

PROMOSI KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PRODUK UNGGULAN KALTENG

Saban tahun sejak tahun 1993, Festival Budaya Isen Mulang diselenggarakan sebagai salah satu mata rangkaian

33

TENTANG PEMASARAN PRODUK UNIT USAHA KELOMPOK TANI DI MANUHING RAYA: PERTANIAN DAN PERIKANAN

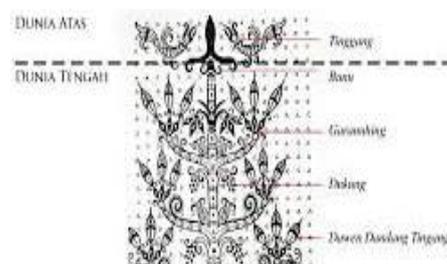
38

Unit Usaha Kelompok Tani Kecamatan Manuhing Raya mencakup 7 lokasi yaitu 1 dusun, 5 desa, dan 1 kelurahan.

28

OPINI

PAHÉWAN & KALÉKA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH



Salah satu wujud kearifan lokal dalam mengelola hutan adalah Pahewan, kawasan hutan lebat dengan pepohonan besar, baik yang terdiri dari satu jenis pohon seperti hutan tabelien (kayu besi) maupun hutan

Panutung Tarung Edisi 12 Tahun 2024 kembali menemui para pembaca dengan topik utama mengenai Hak Atas Tanah dan Kepemilikan Tanah serta Hutan Adat di Kalimantan Tengah (Kalteng), hasil penelitian yang dilakukan oleh anggota-anggota Redaksi beberapa waktu lalu.

Selain itu Panutung Tarung Edisi 12/2024 ini juga mengangkat soal-soal yang masih berhubungan dengan soal tanah yaitu kawasan adat, yang oleh Orang Dayak Ngaju disebut kaléka dan pahéwan. Kaléka dan pahéwan cukup banyak dan luasnya cukup besar di Kalteng, tapi sangat luput dari perhatian umum. Kawasan-kawasan ini dibicarakan di sini dengan menghubungkannya dengan masalah perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Dalam rangkaian memperingati hari jadi Kalteng sebagai provinsi otonom, sejak tahun 1993 dilangsungkan secara teratur saban tahun Festival Budaya Isen Mulang (FBIM). Tahun 2024 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng dibawah kepemimpinan Adiah Chandra Sari, S.H., M.H, dengan motto 'The Power of Culture', mengembangkan cakupan FBIM dengan Festival Kuliner Nusantara. Guna mengetahui lebih jauh perkembangan FBIM, Pebri Ayu Lestari, Pemimpin Redaksi majalah ini bersama

Michael Henrico telah mewawancarai pihak Disbudpar Provinsi Kalteng. Hasil wawancara tersebut turut dilaporkan dalam Edisi 12/2024 ini.

Peristiwa penting lain yang juga dilaporkan melalui Edisi ini adalah kegiatan Sakula Budaya Angkatan II yang diberi nama Sakula Budaya Handep-Hapakat Desa Sumur Mas, Kecamatan Téwah, Kabupaten Gunung Mas. Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kadis Disbudpar Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, S.H., M.H. dalam sambutan maing-masing, menjelaskan arti penting Sakula Budaya ini, kegiatan yang akan terus dikembangkan di daerah perdesaan Kalteng. Laporan tentang Sakula Budaya Angkatan II, Handep-Hapakat ini, ditulis langsung oleh Tim Penanggungjawabnya yaitu Pija: menambah semarak edisi, juga mengingatkan Dayak angkatan sekarang dan yang akan datang untuk mengembangkan sastra Dayak dalam segala genre-nya. Dayak Hingkat, Dayak Batarung, Dayak Manang Manggatang Utus! Tabé Dayak Utus Panarung.

Pimpinan Redaksi

Pebri Ayu Lestari

Susunan Pengasuh

Penanggung Jawab

Yanedi Jagau

Pimpinan Redaksi

Pebri Ayu Lestari

Sekretaris Redaksi

Rama

Redaktur Pelaksana

Kusni Sulang

Layout/ Tata Letak/ Ilustrasi

Didik Gunawan

Tim Marketing & Periklanan

Pija Ramadhani

Maya Citra Sari

Michael Hendrico

Tim Percetakan

Gusmianto

Pritendie

Anggota Redaktur

Destano Anugrahnu

Standy Christianto

Ary Prasetyo

Layanan Iklan

WA : +62 859-3659-7387

Email :

michael.hendrico@

borneoinstitute.org

Kontak

pebri.ayulestari@

borneoinstitute.org



MAFIA TANAH SEMAKIN MEMBABI BUTA

Oleh: Destano Anugrahu

Jika kita berbicara tentang sistem penguasaan tanah di republik ini maka tentu tidaklah mungkin bisa dilepaskan dari konsep reforma agraria. Di Indonesia sekarang ini, nampak tak ada keraguan bahwa diagendakannya (kembali) untuk kesekian kalinya program reforma agraria (*land reform/agrarian reform/pembaruan agraria*) ke dalam proses kebijakan pemerintah nasional dalam sebuah produk hukum Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang sebenarnya tentu

tidak baru dan tidak asing lagi bagi telinga masyarakat Nusantara bahkan jauh sebelum era pemerintahan saat ini telah seringkali dideinggunkan, akan tetapi terus saja hanya konsisten pada besar dan gagahnya, nama atau program belaka, akan tetapi pada sisi yang lain juga tetap konsisten dalam miskin dampak dan perubahannya atas masalah pokok yang telah berlangsung sadari lama dirasakan dan dihadapi masyarakat di negeri ini, sebagaimana mandat konstitusi yang semestinya di ejawantahkan lewat

politik dan hukum yang konkret untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

Sebagaimana dikemukakan membicarakan keterlibatan kewenangan khusus dari pemerintahan, termasuk membuat aturan dan kebijakan, land reform tanpa partisipasi negara sungguh mustahil. Dalam rumusan Solon Baraclough (2001), land reform tanpa partisipasi negara sama dengan *contradiction in term*. Dalam rumusan lainnya, land reform adalah "suatu operasi untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang melalui penggunaan kewenangan pemerintahan dalam membuat legislasi, dan kekuasaan membuat legislasi itu berjalan melalui suatu program pemerin-



Foto: Tim Boreneo Institute melewati lahan yang baru digarap oleh masyarakat setempat di Kecamatan Manuhing Raya tak lama ini./Borneo Institute

tah, secara terencana untuk mewujudkan cita-cita konstitusional mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin perdesaan” (*Rachman, 2012:1*). Jadi, land reform bagaimana pun merupakan suatu operasi yang di dalamnya membutuhkan kekuasaan negara yang sah untuk melakukan tindakan membatasi hak-hak istimewa para penguasa tanah luas, yang tanahnya hendak ditata penguasaan dan pemanfaatannya (*Lipton, 2009: 238*).

Pelaksanaan dan hasil-hasil land reform di banyak negara tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Tentu banyak faktor yang menyebabkannya. Dari penelitian komparatif mengenai pelaksanaan land reform di berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, Sein Lin (1974), mendaftarkan syarat-syarat pelaksanaan landreform yang berhasil, yakni: basis konstitusional yang mantap, perundang-undangan landreform yang tegas, organisasi pelaksana landreform yang mantap, proses administrasi pertanahan yang dapat dipercaya, perangkat mesin peradilan yang kuat, perencanaan, riset dan evaluasi yang jitu, pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran, biaya pelaksanaan landreform yang cukup, pemerintahan lokal yang aktif,



Foto: Potrait lahan yang baru digarap oleh masyarakat setempat di Kecamatan Manuhing Raya tak lama ini./Borneo Institute 2024.

dan organisasi petani yang pro-aktif.

Mengacu pada istilah “kemiskinan struktural” sebagai sebuah kondisi kemiskinan yang penyebabnya keadaan struktur, tatanan kehidupan atau tatanan sosial yang tidak adil (*BPS, 2008; Wiradi, 2000*). Struktur yang dimaksud bisa berasal dari kebijakan atau aturan hukum yang berdampak melenceng dari tujuan, karena pelaksanaannya yang tidak sesuai kepentingan, atau memang kebijakan yang dibuat itu sendiri memang penuh kepentingan sehingga aturan atau kebijakan yang diciptakan tidak memiliki keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih luas, melainkan hanya mengabdikan pada kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.

Secara regulasi dan program kebijakan terkait reforma agraria di Indonesia sebenarnya sudah cukup jelas dan banyak termuat

dalam berbagai program dan kebijakan dari rezim ke rezim yang selalu saja hanya berkutat dengan “besar namanya namun miskin dampak perubahan penyelesaian masalah utamanya”, bahkan amanat itu secara konkret tersurat dalam pasal dan ayat konstitusi. Akan tetapi kesesatan berpikir tersebut terus dipelihara dengan dalil demi kesejahteraan bangsa dan negara, pasal 33 ayat 3 UUD yakni berkaitan “*Hak menguasai Negara*” terus saja ditafsir secara tunggal guna memberikan legitimasi kesesatan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan menjaga keramahan iklim investasi sekaligus terjebakannya negara dan pemerintahan dalam liberalisasi ekonomi global yang dibangun kaum kapitalis, sebagaimana yang bisa kita lihat pada saat ini dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana tentu semua praktisi dan akademisi hukum sangat paham ada-

nya kecacatan proses formil dan meteril dari regulasi ini, kenyataan yang demikian nampaknya berkesesuaian dengan apa yang pernah Mahfud MD katakan dimana pembangunan negara hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi maka produk hukumnya akan bersifat konservatif.

Hukum memang selalu menyediakan arena pertarungan interpretasi oleh karena itu tidak ada kebenaran absolut disana, ditambah lagi semakin hari semakin banyak akademisi yang sudah menjadi bagian yang terjebak dalam system ekonomi kapitalis membuat golongan inilah yang juga memuluskan pemikiran untuk pembangunan nasib sumber-sumber agraria boleh mengalami pengesampingan, pengesampingan dengan baju aturan yang legal dinegara ini semakin terbukti dengan banyaknya pengkhianatan Undang-Undang sektoral atas konstitusi dan prinsip dasar dari reforma agraria. Sehingga mengutip apa yang pernah dikatakan oleh beberapa kaum bijak pada masa lalu berkenaan adanya "*pengkhianatan kaum intelektual*" itu benar adanya, karena dengan secara sadar dan tanpa paksaan, atas nama kajian dan peraturan yang mengandung kekeliruan dan bahkan

bernuansa pengkhianatan atas amanah konstitusi tersebut berlangsung didepan kaum cerdik pandai itu sendiri, bahkan oknum-oknum tersebut jugalah yang menjadi bagian pengagasnya.

Bagaimana dengan Kalimantan Tengah?

Kesesatan dalam penyusunan konsep pembangunan negara khususnya dalam konteks pemanfaatan dan penguasaan tanah berlanjut pada daerah-daerah Indonesia, di perparah dengan semakin minimnya pelibatan masyarakat adat dan masyarakat disekitar area pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Selanjutnya sekarang sudah saatnya merubah paradigma pembangunan yang dilakukan secara spartan terutama yang terjadi di negara kita republik Indonesia ini khususnya daerah non metropolitannya. Seringkali penguasa dan pemerintah kita menganggap tanah sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan sehingga atas nama pembangunan, pertumbuhan ekonomi pun di genjot dan dijadikan indikator tunggal dari pembangunan itu sendiri, sehingga alih-alih menyelesaikan konflik dan potensi konflik agraria yang terjadi justru penyelenggara kita terus saja melakukan eksplorasi dan eksploita-

si lingkungan atau sumber daya alam yang membuat penyelesaian permasalahan agraria tidak terjamah dan memicu '*terbidaninya*' konflik baru pun tidak terhindarkan karena kita juga tahu persis dimana kegiatan atau aktivitas perusahaan lingkungan selalu saja paket lengkap dengan konflik agraria, hal yang demikian juga tentu berakibat ketidaksesuaian pada fungsi tanah, yaitu seperti fungsi sosial, pertanian, tradisi dan keagamaan, mengembangkan peradaban dan lainnya lagi sehingga tidak semata untuk fungsi ekonomi, seringkali proses pembangunan dan penggunaan tanah hanya memperhitungkan fungsi ekonomi dari tanah dan justru mengabaikan fungsi lainnya yang sebenarnya memiliki keterikatan dan tidak terpisahkan.

Pada provinsi Kalimantan Tengah sendiri kompleksitas permasalahan terkait penguasaan tanah memang berkelindan sedemikian rupa, karena nampak seperti telah dipelihara dan tidak terselesaikan sehingga menjadi benang kusut yang tak jelas dari mana mesti memulai untuk mengurainya. Salah satu permasalahan yang menahun di Bumi Tambun Bungai ini yakni masalah kawasan hutan, karena hampir 80%

wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan hutan, hal demikian membuat begitu kecilnya legitimasi penguasaan dan kepemilikan oleh masyarakat lokal secara kamata hukum positif, sementara pada wilayah yang telah ditetapkan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), telah dialih fungsikan untuk perkebunan dan pertambangan.

Peristiwa yang demikian membuat masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah mencoba berupaya menerobos mencari jalan baru untuk bisa mendapatkan legalitas atas tanah, pada saat itu muncullah program 'Dayak Misik' lewat skema pengadministrasian Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), secara ide keberpihakan program ini sangat baik untuk memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan tanah masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, akan tetapi didalam perjalanannya karena semakin disadari adanya nilai ekonomis dengan menggunakan skema tersebut yang terjadi justru semakin liar dan mafsif lahirnya *broker* dan mafia tanah di Kalimantan Tengah sehingga akhirnya dikeluarkan adanya regulasi yang membatasi program 'Dayak Misik' lewat skema Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), lebih lanjut pada saat ini mu-

lai marak digunakan skema kelompok tani oleh banyak masyarakat di Kalimantan Tengah pada berbagai kabupaten untuk menguasai tanah, yang sayangnya juga tetap pada muara untuk menjual tanah pada korporasi, bukan dimanfaatkan dan dikelola untuk kegiatan produktif pertanian dan produksi kehidupan kelompok, sering kali kelompok tani hanya menjadi topeng untuk menuju monopoli tanah oleh tokoh-tokoh pemodal di setiap desa atau kampung. Tentu peristiwa demikian tidak terlepas dari kemiskinan terstruktur yang terjadi di tengah warga masyarakat, sehingga pragmatisme warga melihat fungsi dan nilai tanah semakin menjadi-jadi, akan tetapi ini juga menyisakan pertanyaan kritis dan tajam kepada kita semua di Provinsi ini khususnya suku bangsa Dayak, apakah kita kehilangan tuntunan dan nilai kearifan didalam melihat tanah? atau kita sedang mempersiapkan tergenosidanya kebudayaan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan ketiadaan lagi sumber produksi tanahnya, dan akan menjadi seperti warga pendatang atau tamu di daerah dan wilayah yang diwariskan nenek moyang kita ini?

●●●

“

Reforma agraria di Indonesia sering kali hanya menjadi nama besar tanpa dampak nyata. Tanah, yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, justru sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakadilan. Sudah saatnya kita mengubah paradigma pembangunan dan mengembalikan tanah kepada fungsi sosial, budaya, dan lingkungan yang sebenarnya

”



Hutan Adat di Desa Lawang Kanji. Foto.dok.Pritendie 2024

HUTAN ADAT DAMANG BATU

Segenggam Harapan Masa Depan

Oleh: Didik Gunawan & Gusmianto

Hutan adat di Kecamatan Damang Batu, Gunung Mas, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sukses. Dengan dukungan yang tepat, Masyarakat Adat Dayak dapat mempertahankan warisan leluhur mereka sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Benteng terakhir dalam melawan degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Hutan Adat bukan hanya sekadar hutan, tetapi juga simbol perjuangan dan identitas yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya dan kehidupan Masyarakat Adat Dayak. Dalam beberapa tahun terakhir, Hutan Adat

mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah melalui kebijakan perhutanan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat Adat dan melestarikan hutan. Namun, perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut masih penuh tantangan.

Tantangan geografis juga sangat mempengaruhi perkembangan Masyarakat Adat Dayak di daerah pedalaman (terpencil) Pulau Kalimantan. Salah satunya adalah Kecamatan Damang Batu yang mana kecamatan ini merupakan kecamatan terakhir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Waktu tempuh perjalanan darat dimulai dari Kota Palangka Raya menuju ke Kecamatan Damang Batu adalah + 8 jam perjalanan. an roda empat, kecuali mobil yang bergardan ganda.

Itupun jika dalam kondisi jalan kering, namun jika kondisi jalan basah setelah diguyur hujan, maka hampir dipastikan untuk menuju ke sana perlu waktu lebih. Hal ini karena kondisi jalan akan licin dan berlumpur, sehingga memiliki resiko akan tergelincir dan terperosok ke jurang yang ada di pinggir jalan yang dilalui. Kontur jalan perbukitan yang menanjak serta belum layaknya permukaan jalan untuk dilalui oleh kendaraan roda empat (harus mobil double gardan).

Disamping kondisi jalan, infrastruktur lain seperti listrik dan telekomunikasi juga masih belum memadai. Listrik memang baru dalam proses pemasangan hanya sampai pertengahan wilayah kecamatan saja (Desa Lawang Kanji), namun aliran Listrik yang sudah menyala baru di Desa Tumbang Marikoi saja. Sedangkan untuk sinyal telekomunikasi, masih belum 100% beroperasi, tower jaringan sudah berdiri, tetapi sinyal masih belum lancar. Kemungkinan ini adalah imbas dari kasus mega korupsi BTS yang sedang ditangani oleh pemerintah pusat.

Hutan Adat merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berbagai peratur-

an turunannya. Hutan Adat diakui sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola secara turun-temurun berdasarkan kearifan lokal. Di Kecamatan Damang Batu, pengakuan ini diperoleh setelah perjuangan panjang Masyarakat Adat untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan hutan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Perhutanan sosial, termasuk Hutan Adat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah Gunung Mas telah mengesahkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pengelola Hutan Adat ini. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus.

Kelurahan Tumbang Marikoi

Hutan Adat di Kelurahan Tumbang Marikoi berada pada kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM), yang juga merupakan bagian dari Perhutanan Sosial. Kondisi ini memerlukan solusi agar pengelolaan hutan dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih kebijakan.

Desa Tumbang Posu dan Desa Tumbang Maraya

Permasalahan batas desa antara Desa Tumbang Posu dan Desa Tumbang Maraya, di mana rumah dan kantor desa Tumbang Posu berada di peta administratif desa Tumbang Maraya, berdampak pada posisi dan pengelolaan Hutan Adat. Penyelesaian masalah batas desa ini penting untuk memastikan keberlanjutan Hutan Adat, khususnya peran pemerintah dalam hal penyelesaian masalah tata batas desa ini, karena masyarakat di kedua desa tersebut kerap kali mempertanyakan solusi penyelesaian masalah tata batas desa kepada siapa saja yang datang melaksanakan pertemuan di salah satu desa tersebut.

Kelurahan Tumbang Marikoi, Desa Tumbang Posu, dan Desa Tumbang Maraya

Tiga desa ini berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit PT. Kalimantan Agro Pusaka (PT. KAP). Hutan Adat yang berada di kawasan ini harus melewati wilayah perusahaan tersebut, yang menambah kompleksitas dalam pengelolaannya. Bahkan posisi perkebunan kelapa sawit itu membelah Hutan Adat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat berdasarkan SK yang telah dikeluarkan, yang akhirnya masyarakat harus melewati perkebunan kelapa sawit dahulu untuk dapat sampai ke lokasi Hutan Adat.



Foto: Tim BIT sedang berdiskusi dengan masyarakat desa setempat. Dok BIT 2024

Desa Lawang Kanji

Di Desa Lawang Kanji, masih terdapat kesenjangan sosial, terutama dalam kepemilikan tanah dan ladang di sekitar Hutan Adat. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Desa Karetan Rambangun, Desa Karetan Sarian, dan Desa Tumbang Mahuroi

Tantangan utama di desa-desa ini adalah akses jalan yang buruk, yang menghambat mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kondisi jalan terburuk terletak pada tiga

desa ini, karena jika kondisi sedang hujan lebat maka jalan tidak bisa dilalui dahulu hingga menunggu hujan reda dan jalan agak kering. Bahkan menurut informasi masyarakat jika jalan menuju Kelurahan Tumbang Marikoi tidak bisa dilalui, maka mereka akan menggunakan jalan alternatif melalui Kabupaten Katingan. Apalagi jika Sungai Kahayan dalam kondisi banjir, maka otomatis jalan antar desa akan terputus tidak dapat dilalui lagi dan hanya bisa dilalui lewat jalur sungai. Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam proses pemanfaatan Hutan Adat menjadi peluang bisnis.

Desa Tumbang Anoi

Desa Tumbang Anoi memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Dayak, merujuk pada Perjanjian Tumbang Anoi. Rapat besar itu digelar pada 22 Mei hingga 24 Juli 1894. Rapat ini dilakukan untuk menyudahi tradisi permusuhan antar sub-suku Dayak seperti pemotongan kepala, saling membunuh dan perbudakan di seluruh wilayah Kalimantan. Ada 152 suku di undang dalam rapat besar ini.

Rapat besar ini menghasilkan tatanan bersama dengan diwujudkan kesepakatan untuk menyera-gamkan aturan dalam hu-

kum adat yang sifatnya umum. Pertemuan itu membahas 592 perkara yang terdiri dari 96 pasal dalam aturan hukum adat.

Sejarah dan tradisi yang kuat di desa ini harus dipertahankan dan diberdayakan dalam pengelolaan Hutan Adat. Desa ini juga memiliki potensi wisata sejarah yang bagus untuk dapat dikembangkan, hanya saja sekali lagi kondisi infrastruktur jalan yang menjadi kendala dalam mengakses lokasi objek wisata tersebut.

Kondisi Sosial dan Kultural Masyarakat Adat Dayak

Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Damang Batu memiliki sistem nilai dan kearifan lokal yang kaya, misalnya mengenai praktik berladang atau Malan, Kaleka atau hutan kebun tradisional hingga wawasan mengenai tumbuhan hutan sebagai obat herbal. Namun perubahan sosial dan ekonomi yang cepat membawa tantangan tersendiri. Perubahan pola hidup dari agraris ke arah yang lebih modern membuat sebagian masyarakat mulai meninggalkan tradisi dan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Ini menyebabkan melemahnya dukungan internal terhadap pengelolaan Hutan Adat.

Usia tokoh adat yang sudah tua dan praktik-praktik adat

yang belum sepenuhnya membantu dalam pengelolaan hutan menjadi tantangan tambahan. Sehingga diperlukan regenerasi kepada generasi yang lebih muda untuk bersama dalam pengelolaan hutan adat yang optimal berjalan beriringan dengan kearifan yang luhur dan bijak yang telah diwariskan oleh nenek moyang suku Dayak dahulu.

Selain itu, konflik sosial acap kali terjadi diantara sesama keluarga maupun tetangga. hal itu dapat dipicu beberapa faktor, seperti batas tanah hingga kepastian legalitas yang tak kunjung didapat masyarakat adat.

Konflik dengan orang luar desa juga masih dijumpai, dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan peraturan pemerintah maupun kekuatan legalitas.

Kemampuan masyarakat dalam mengelola Hutan Adat untuk memberikan tambahan nilai ekonomis tanpa merusak hutan tersebut juga masih perlu ditingkatkan. Penguatan Masyarakat Hukum Adat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Kegiatan Sosialisasi Berbasis *Padiatapa* (FPIC)

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penting adanya kegiatan sosialisasi yang mengedepankan prin-

sip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang diindonesiakan menjadi *Padiatapa* (Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan).

Sosialisasi ini bertujuan memastikan bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan Hutan Adat dilakukan secara sukarela, dengan pemahaman penuh, dan setelah melalui proses konsultasi yang menyeluruh dengan Masyarakat Adat.

Program sosialisasi berbasis *Padiatapa* dilakukan melalui serangkaian lokakarya (*workshop*), diskusi kelompok terfokus, dan kunjungan lapangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, dan pemerintah desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan Hutan Adat, serta manfaat jangka panjang dari keberlanjutan hutan tersebut.

Pada kegiatan *Padiatapa* yang telah dilakukan dan mendapat sambutan antusias oleh masyarakat Kecamatan Damang Batu, hal ini bisa dibaca sebagai tingkat hasrat ikut-serta kalangan masyarakat untuk mengikuti kegiatan. Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan untuk menampung aspirasi-aspirasi masya-

Perjalanan pengelolaan Hutan Adat di Kecamatan Damang Batu masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat dari semua pihak, masa depan yang lebih baik bagi Masyarakat Adat dan kelestarian hutan dapat tercapai. Hutan Adat bukan hanya sekadar hutan, tetapi juga simbol perjuangan dan identitas yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.



Foto: Pohon berdiameter 1 meteran menjulang di Kaleka Sapi Matei, Gunung Mas, Kalteng. Dok BIT 2024

PEGELARAN SENI SAKULA BUDAYA “HANDEP HAPAKAT” DESA SUMUR MAS

Oleh: Pija Ramadhani & Maya Citra Sari



Foto bersama pada penutupan Sakula Budaya “Handep Hapakat” desa Sumur Mas. Foto. Dok. Bit. 2024

Pada siang hari di tanggal 3 Maret 2024, matahari sedang gagahnya memancarkan terik, namun situasi ini tidak memadamkan semangat anak-anak yang berbondong-bondong berjalan kaki menuju Gedung Gereja Bethel Indonesia Sumur Mas, bergandengan tangan sambil tertawa cekikikan, ada juga yang berlarian seperti ingin memenangkan lomba marathon. Orang tua peserta terutama yang ibu-ibu pun tidak mau kalah aksi, turut hadir dengan riasan bedak

dan perona bibir berwarna merah.

Tampak pula dari kejauhan kilauan rambut bapak Ugak D. Jinu (61 tahun) pelatih Silat (Bhs. Dayak Ngaju: main) yang tersisir rapi dipolesi minyak rambut membuat silau mata yang memandangi. Suasana riuh mulai terdengar dari Gedung Gereja Bethel Indonesia Sumur Mas, yang mana pada pukul 14.30 WIB akan dilangsungkan acara pagelaran seni Sakula Budaya “Handep Hapakat”.

Suara gendang, gong dan kecapi bersahut-sahutan seakan sedang menyambut siapa saja yang datang. Acara ini bukan tanpa rencana. Seperti diketahui, Program Sakula Budaya yang diinisiasi oleh Yayasan Borneo Institute (BIT) bersama Yayasan Good Forest Indonesia (GFI) dengan dukungan pemerintah desa dan warga desa setempat telah berlangsung selama 5 bulan sejak Oktober 2023. Sakula Budaya di desa Sumur Mas yang diberi nama Sakula Budaya Handep-Hapakat ini,

merupakan Angkatan Kedua setelah Angkatan Pertama yang telah berlangsung di desa Linau pada Mei 2023.

Acara pegelaran ini merupakan ajang memperlihatkan kebolehan dalam

ngat mereka untuk tetap mempersiapkan diri dengan maksimal. Hingga tiba pada saatnya, dimana pertunjukan ditata sedemikian rupa, seni-seni ini ditampilkan secara bergantian tanpa ada-

anak yang tidak mampu ditampung oleh ruangan berkapasitas 60 orang.

Bapak Herlison, pelatih karungut dan kecapi yang juga merupakan man-



Kegiatan latihan menari pada Sakula Budaya "Handep Hapakat" Desa Sumur Mas. Foto. Dok. Bit.2024

berbagai seni seperti Silat Dayak (Bhs. Dayak Ngaju: main), Karungut (musikalisasi puisi Dayak Kalimantan Tengah) dan Tari Manasai (tari pergaulan kolektif) yang telah dipelajari oleh peserta selama mengikuti program Sakula Budaya lebih kurang 5 bulan. Didalam mempersiapkan pertunjukan, tidak jarang anak-anak mempertontonkan tingkah konyol mereka selama berlatih, yang tentu saja mengundang gelak tawa setiap yang melihat. Namun hal ini tidak menyurutkan sema-

nya jeda, diiringi oleh musik tradisional Dayak. Tidak hanya itu, yang bertugas sebagai pemandu acara seperti MC dan lainnya semuanya dilakukan oleh para peserta Sakula Budaya yang terdiri dari anak-anak usia 8-14 tahun, dengan harapan dapat mengasah bakat dan menumbuhkan kepercayaan diri.

Antusiasme warga desa terhadap Program Sakula Budaya dan acara ini diperlihatkan oleh kehadiran sekitar 150 orang dari orang-orang dewasa dan anak-

tir adat di desa Sumur Mas secara khusus menyiapkan hadiah untuk peserta terbaik dan teraktif selama masa pelatihan. Antusias warga lainnya dapat dilihat dari Ibu Tuti atau dikenal sebagai Indu Jodi hadir dengan membawa anaknya yang masih kecil demi dapat menyaksikan acara pegelaran ini.

Seperti selalu, turut hadir dalam acara baik pembukaan maupun penutupan ini, perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

“

Seni-seni Dayak seperti Silat, Karungut, dan Tari Manasai ditampilkan dengan penuh semangat oleh anak-anak usia 8-14 tahun

”

ta (Disbudpar) Provinsi Kalimantan Tengah, utusan Disbudpar Kabupaten Gunung Mas, pemerintah desa Sumur Mas sebagai bentuk pernyataan dukungan. Selain itu turut hadir perwakilan dari Komunitas Budaya Maruak Dohong Têwah, dan rekan-rekan NGO Yayasan Tambuhak Sinta Palangka Raya.

Oleh sempitnya ruangan, sebagian warga desa yang tidak mendapat tempat duduk, menyaksikan berlangsungnya acara dari luar gedung, melalui celah pintu dan jendela. Sementara Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekalipun tidak bisa hadir langsung telah mengirimkan sambutan tertulis, yang selain menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Program ini.

"Selaku Direktur Jenderal Kebudayaan yang bertugas melaksanakan amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan, saya tentu menyambut baik Sakula Budaya ini sebagai sebuah tonggak penting. Sakula Budaya ini membuka jalan bagi anak-anak kita untuk mengenal lebih dekat kebudayaan mereka, bukan hanya yang terkait kesenian, tapi juga yang berkaitan dengan kebiasaan hidup kita, seperti sandang dan pangan," kata Hilmar Farid.

Untuk mengkonsolidasi hasil-hasil yang dicapai oleh Sakula Budaya ini dan meneruskan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dalam berbagai bidang, para pemuka desa bersepakat membentuk sebuah organisasi kebudayaan bernama *Sanggar Budaya Handep-Hapakat Desa Sumur Mas* yang diketuai oleh Yater Sahabu, dibantu oleh Herlison, mantir adat Desa Sumur Mas. Akta Notaris organisasi kebudayaan ini sedang dalam proses pembuatannya oleh notaris Oktavianus Marit, S.H., di Kuala Kurun, ibukota Kabupaten Gunung Mas, yang sekaligus akan mendaftarkannya di Kemenhumkam di Jakarta. Ini adalah salah satu cara kongkret mewujudkan keinginan Dayak 'Manggatang Utus', bagian utuh dari pemberdayaan menyeluruh.

Sebagai tanda telah menyelesaikan Sakula Budaya, kepada semua peserta diberikan Sertifikat berbingkai. sedangkan sertifikat terimakasih diberikan kepada pemerintah desa, sekolah-sekolah dan para pelatih. ●●●

*** Pija Ramadhani dan Maya Citra Sari, penanggungjawab pelaksanaan Sakula Budaya Handep-Hapakat Desa Gunung Mas.**





Pengisian formulir Sakula Budaya oleh siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Sumur Mas. Foto.dok.Pija Ramadhani 2024.

Keadaan sosial menentukan pikiran dan perasaan manusia, demikian didalilkan oleh sementara aliran dalam ilmu sosial. Melalui pekerjaan di daerah pedesaan bertahun-tahun selama ini, penulis mendapatkan adanya kecenderungan di kalangan warga di daerah pedesaan Dayak untuk dengan mudah menjual tanah milik mereka sehingga memunculkan suatu hipotesa bahwa antara warga Dayak dan tanah kurang adanya hubungan emosional. Hal yang berbeda dengan yang terdapat di masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur.



KALTENG **PETAK DANUM** BERKELANJUTAN DI DESA

■ Oleh: Ary Prasetio M.

Tanah atau dalam bahasa Dayak Ngajunya petak adalah sumber daya alam yang sangat berharga, lebih dalam lagi disebut petak danum simbol kehidupan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar bergantung pada hasil alam.

Menjaga petak danum di pedesaan penting untuk memastikan kelangsungan pertanian, dan juga untuk melindungi ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Dalam tulisan ini, penulis

akan membahas berbagai cara untuk menjaga tanah di pedesaan melalui praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

Desa merupakan tempat oase dari hiruk-pikuk kota. Keindahan alam diberikan tak dipungut biaya oleh sang pencipta. Seperti Di Daerah Rakumpit, Palangka Raya dapat ditempuh jalur darat atau sungai menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 jam. Memiliki banyak potensi sumber daya alam dari sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, flora

dan fauna dan juga potensi pariwisata baik wisata alam maupun budaya.

Namun, seperti kepercayaan masyarakat lokal, jika alam dan manusia saling memberi dan menjaga, maka sewajibnya kita menjaga alam dengan bergandengan tangan. Tak direbut oleh mafia 'tuan tanah' yang sedang berkeliaran membidik tanah.

Menjaga tanah cerminan rasa cinta dan penghargaan terhadap alam. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana ungkapan rasa



Akses jalan menuju Kaleka Sapi Matei, melewati lahan yang telah dibersihkan untuk menanam Jagung. Foto.Dok. Pritendie 2024

menjaga tanah di pedesaan dapat diwujudkan melalui berbagai praktik dan tindakan.

Siapa Pemilik Tanah di Desa?

Ada pepatah, jika untuk mengetahui sesuatu kita perlu datang langsung bahkan sampai hafal bau keringat masyarakat, sebagai pengetahuan berjalan. Setelah melakukan obrolan dan tanya sana sini berbaur dengan masyarakat sembari melaksanakan tugas organisasi, muncul kasak-kusuk mengenai siapa sejatinya pemilik tanah di desa.

Daerah Rakumpit kebanyakan tanah masih dimiliki oleh orang-orang lokal baik secara berkelompok maupun individual, mayor-

itas dari mereka menggunakan surat garapan dan segel sebagai dasar klaim atas tanah yang mereka kuasai.

Dari wawancara yang kami laksanakan di suatu kelurahan (X) yang dilakukan terhadap 41 orang dan terdapat 5 orang pemilik lahan terbesar yang kami lakukan triangulasi, diperkirakan sekitar 12.381 Ha telah dikuasai oleh masyarakat di kelurahan. Dan beberapa kelurahan lain pun hampir sama rata-rata dimiliki oleh orang lokal, namun untuk legalitas lahan masih beragam mulai dari Surat Garapan, sampai kepada Surat Pernyataan Tanah (SPT).

Legalitas tersebut di mata masyarakat kerap terjadi konflik sengketa la-

han. Ada yang tumpang tindih kepemilikan, rentan tak diakui secara legal hukum yang berlaku. Bahkan terdapat masyarakat yang berhadapan dengan perusahaan akibat persoalan legalitas tanah.

Kenapa Tanah Mau di Jual ?

Tanah di pedesaan sering kali dianggap sebagai warisan berharga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, di era modern ini, berbagai faktor ekonomi, sosial, dan pribadi bisa mendorong seseorang untuk mempertimbangkan menjual tanahnya di pedesaan. Rasa ingin menjual tanah ini bisa muncul dari berbagai alasan yang mendalam dan kompleks

Namun karena di daerah Rakumpit sudah ma-

suk perusahaan, mulai dari perkebunan sawit, perusahaan hutan tanaman industri dan lainnya, maka mereka berlomba-lomba untuk menjual tanah mereka kepada perusahaan. Tergier dengan uang yang mereka dapatkan, dan mereka mengatakan masih banyak juga mereka memiliki tanah, sebagian masyarakat beranggapan tidak masalah menjual tanah sebagian yang dimiliki.

Alasan Ekonomi

Salah satu alasan utama yang mendorong keinginan menjual tanah di pedesaan adalah faktor ekonomi. Banyak pemilik tanah di pedesaan yang menghadapi tekanan finansial, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, atau peningkatan biaya hidup. Menjual tanah bisa menjadi solusi untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Penelitian menunjuk-

sehingga mereka memilih untuk menjual tanah dan mencari sumber pendapatan lain.

Perubahan Gaya Hidup

Perubahan gaya hidup juga memainkan peran penting dalam keinginan untuk menjual tanah. Generasi muda di pedesaan sering kali tertarik untuk mencari peluang di kota-kota besar, baik untuk pendidikan maupun pekerjaan. Mereka mungkin merasa



Foto: Kelompok Tani di Gunung Mas menunjukkan hasil tanahnya, Bibit dan buah Rimbang. Dok BIT 2024

Namun ada banyak juga masalah yang ditemui saat menjual tanah-tanah tersebut, mulai dari tumpang tindihnya surat-surat, belum ada kejelasan siapa yang memiliki tanah, komunikasi dengan pihak perusahaan yang masih belum baik sampai informasi dari perusahaan yang masih setengah-setengah ingin membeli tanah.

kan bahwa urbanisasi dan perkembangan infrastruktur sering kali meningkatkan nilai tanah di pedesaan. Pemilik tanah melihat ini sebagai peluang untuk menjual tanah dengan harga yang menguntungkan. Selain itu, beberapa pemilik tanah mungkin merasa bahwa hasil pertanian atau peternakan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka,

bahwa kehidupan di kota menawarkan lebih banyak peluang dan kenyamanan dibandingkan dengan kehidupan di desa.

Selain itu, migrasi urban juga membuat beberapa keluarga berpindah dari desa ke kota untuk mendekatkan diri dengan pusat-pusat ekonomi dan pendidikan. Dalam situasi ini, tanah di pedesaan yang

ditinggalkan mungkin dianggap sebagai aset yang tidak produktif, sehingga keputusan untuk menjual tanah menjadi lebih menarik.

Faktor Sosial dan Keluarga

Dinamika keluarga juga bisa mempengaruhi keputusan untuk menjual tanah. Konflik keluarga mengenai pembagian warisan atau pengelolaan tanah sering kali menjadi alasan utama. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan tentang cara mengelola atau membagi tanah bisa mendorong keputusan untuk menjualnya.

Selain itu, beberapa keluarga mungkin merasa tidak memiliki anggota keluarga yang berminat atau mampu mengelola tanah. Dalam situasi seperti ini, menjual tanah dianggap sebagai cara terbaik untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak terbengkalai dan tetap memberikan nilai ekonomi.

Dampak Penjualan Tanah ?

Menjual tanah di pedesaan bisa memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dari

sisi positif, penjualan tanah dapat memberikan sumber dana yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial. Selain itu, tanah yang dijual kepada investor atau pengembang bisa membuka peluang untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah tersebut.



Menjual tanah secara masif dapat mengakibatkan anak cucu kita nantinya tidak memiliki tanah untuk mereka tinggal



Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Penjualan tanah yang masif bisa mengakibatkan perubahan sosial dan budaya di komunitas pedesaan. Hilangnya lahan pertanian dapat mengurangi ketahanan pangan lokal dan mengubah lanskap pedesaan. Selain itu, penjualan tanah kepada

pengembang besar sering kali mengarah pada pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang bisa merusak lingkungan dan ekosistem setempat.

Hasil penjualan tanah yang berupa uang, juga berpotensi menjadi buah simalakama. Seperti yang dialami beberapa masyarakat. Sedikitnya wawasan literasi keuangan, manajemen keuangan dan masih buram akan pengendalian tujuan jual tanah, uang menguap begitu saja. Dipergunakan beli ini itu tanpa pertimbangan keberlanjutan.

Akhirnya segepok uang hasil jual tanah ludes. Hal itu mirip dialami ibu Sumiati, perempuan 4 orang anak yang saat ini usianya 60 tahun. Ditinggal suaminya meninggal menjadi limbung akibat iming-iming sementara hasil penjualan tanah, berharap membantu anak-anaknya dari sekolah hingga membuka lapangan pekerjaan.

Namun sokongan dana dari hasil jual tanah memiliki batas tak seperti kehidupan yang diberikan tanah. Hasil perkebunan hingga buah-buahan masih dapat dinikmati kapanpun asal mau gemi merawat. Jika su-

dah ludes yang tersisa hanya kenangan, pengantar cerita waktu tidur.

Apa yang Bisa dilakukan untuk Menjaga Tanah Kita ?

Langkah pertama, masyarakat harus memiliki persaan Cinta terhadap petak danum, maksudnya masyarakat pedesaan harus memiliki hubungan yang erat dengan tanah. Karena tanah adalah tempat mereka bercocok tanam, menggembala ternak, dan membangun kehidupan.

Oleh karena itu, menjaga tanah harus dilandasi oleh rasa cinta yang tulus. Cinta terhadap tanah berarti memahami bahwa tanah adalah aset berharga yang harus dirawat dan dijaga



Tanah di perdesaan sering kali dianggap sebagai warisan berharga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, di era modern ini, berbagai faktor ekonomi, sosial, dan pribadi bisa mendorong seseorang untuk mempertimbangkan menjual tanahnya

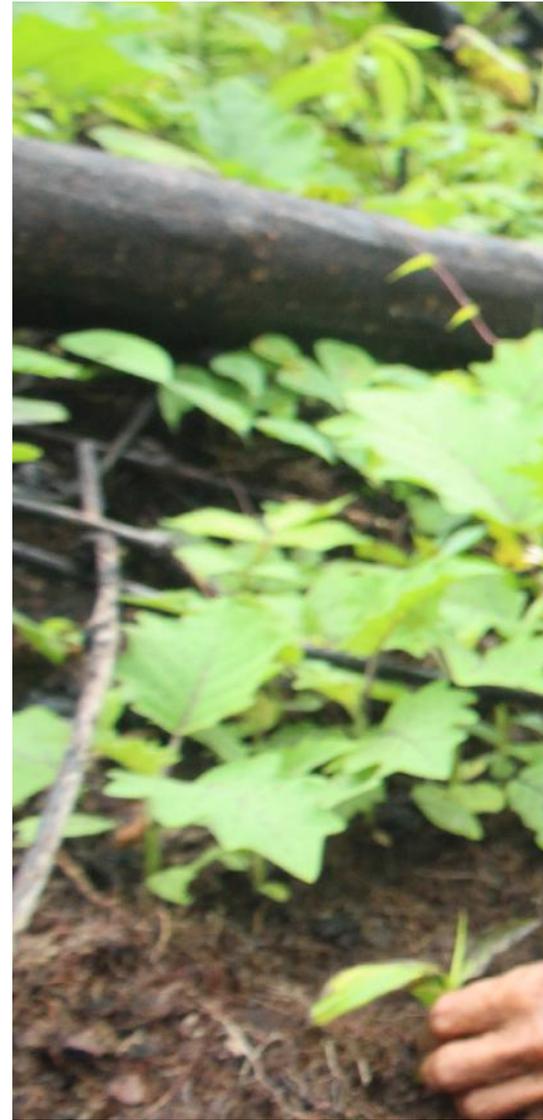


kelestariannya. Rasa menjaga tanah dapat diwujudkan dengan salah satu cara menjaga taha tersebut untuk tidak dijual dengan cara melakukan praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan.

Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman membantu menjaga kesuburan tanah dan mencegah kelelahan tanah akibat penanaman yang berulang-ulang dengan tanaman yang sama. Selain itu, penggunaan pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang juga merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tanah.

Langkah kedua, Menanam pohon salah satu tindakan nyata yang menunjukkan rasa menjaga tanah. Pohon-pohon tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menjaga kestabilan tanah. Akar pohon yang kuat dapat mencegah erosi dan meningkatkan penyerapan air. Program reboisasi dan penghijauan di pedesaan adalah langkah penting untuk menjaga tanah agar tetap subur dan produktif.

Rasa menjaga tanah harus menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Melalui keter-



libatan komunitas, upaya menjaga tanah dapat dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan gotong royong seperti penanaman pohon, pembuatan terasering, dan pembersihan lahan adalah contoh nyata bagaimana rasa menjaga tanah dapat diwujudkan secara kolektif.

Langkah ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya men-



Bp. Ali menanam sayuran di lahan miliknya sebagai salah satu bentuk menjaga tanahnya. Foto.Dok. Melina 2023

jaga tanah merupakan langkah awal yang sangat penting. Melalui pendidikan lingkungan, masyarakat dapat belajar tentang cara-cara menjaga tanah dan dampak positif yang bisa didapatkan. Sekolah, kelompok tani, dan organisasi masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi ini. Dan masih banyak lagi langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga

tanah kita, tergantung dari kebiasaan dan adat di Desa masing-masing.

Menjaga tanah di pedesaan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik-praktik pengelolaan tanah yang baik, teknik konservasi, reboisasi, pertanian berkelanjutan, serta edukasi dan keterlibatan komuni-

tas, kita dapat memastikan bahwa tanah di pedesaan tetap subur, produktif, dan sehat untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan tanah sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan, dan jangan menjual secara masif hal ini dapat mengorbitkan anak cucu kita nantinya tidak memiliki tanah untuk mereka tinggal.



Dr. Hilmar Farid
Dirjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset dan Teknologi *

SAKULA BUDAYA MEMBUKA JALAN BAGI ANAK- ANAK KITA UNTUK MENGENAL LEBIH DEKAT KEBUDAYAAN MEREKA

Salam budaya, Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas berlangsungnya kegiatan Sakula Budaya Handep Hapakat di Desa Sumur Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saya sudah mendengar banyak cerita tentang kegiatan ini tapi suatu waktu ingin menyaksikan sendiri dan berinteraksi dengan para penyelenggara maupun peserta kegiatan ini. Semoga diberi jalan pada suatu waktu.

Selaku Direktur Jenderal Kebudayaan yang bertugas melaksanakan amanat

konstitusi untuk memajukan kebudayaan saya tentu menyambut baik Sakula Budaya ini sebagai sebuah tonggak penting. Sakula Budaya ini membuka jalan bagi anak-anak kita untuk mengenal lebih dekat kebudayaan mereka, bukan hanya yang terkait kesenian, tapi juga yang berkaitan dengan kebiasaan hidup kita, seperti sandang dan pangan.

Saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pemrakarsa Sakula Budaya, serta semua pihak yang telah mengambil bagian, mulai dari komunitas kesenian, pemangku adat desa, pemerintah desa, dan rekan-rekan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, baik dari Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Gunung Mas, yang telah bergotong-royong mewujudkan kegiatan ini dan juga mengawal agar terus bisa berlanjut di masa mendatang.

Sakula Budaya ini juga sejalan dengan semangat program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam program ini para penyelenggara pendidikan dan peserta didik bersama-sama menggali sumber belajar dari kebudayaan setempat. Proses belajar-mengajar pun menjadi lebih intim, lebih menye-

ngangkan, dan berakar dalam kebudayaan.

Sekian sambutan ini saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

Salam budaya,
Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

* Disampaikan Pada Acara Tamat Sakula Budaya Handep Hapakat Desa Sumur Mas, 3 Maret 2024

Preamble *

"Manggatang Utus", ungkapan dan sekaligus merupakan slogan umum di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah hari ini adalah lukisan dari kesadaran bahwa seluruh lapisan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, menyadari keadaan mereka berada di bawah atau terpuruk.

Ungkapan dan slogan ini sama populer serta mempunyai pengertian serupa dengan ungkapan lama "*témpun pétak batana saré, témpun uyah batawah bélai, témpun kajang bisa puat*" (punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar di rasa, punya atap basah muatan". Marjinalisasi ini berifat menyeluruh, termasuk di bidang kebudayaan. ●●●



PERATURAN DASAR SANGGAR BUDAYA “HANDEP-HAPAKAT” DESA SUMUR MAS

Keterpurukan demikian terjadi selain disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan bersifat struktural, yang tidak kurang pentingnya juga adalah sebab internal yang berlangsung dalam perjalanan sejarah Dayak yang panjang sehingga membuat Orang Dayak kehilangan atau tidak mengerti apa-siapa dirinya lagi. Bertemunya sebab faktor eksternal dan internal ini memperparah keterpurukan menyeluruh tersebut. Keperahan keadaan makin meningkat oleh perubahan komposisi demografis di Kalimantan Tengah hari ini yang menempatkan masyarakat Dayak sudah menjadi minoritas di kampung-halaman mereka sendiri. Perubahan komposisi demografis ini berdampak ke segala bidang kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah.

Agar keluar dari keterpurukan menyeluruh demikian, *Jalan Minoritas Kreatif* merupakan alternatif rasional yang seniscayanya ditempuh, dengan pendidikan penyadaran sebagai unsur utama.

Untuk maksud tersebut maka Sakula Budaya

diselenggarakan bermula dari pusat-pusat konsentrasi Orang Dayak bermukim yaitu daerah perdesaan, guna melahirkan kembali manusia Dayak Ideal yang memiliki trilogi karakter yaitu “*mamut-ménténg, pintar-harati, mameh-ureh*” (gagah-berani, pintar-beradab, kritis-ulet). Sumber daya manusia demikianlah kemudian yang menjadi motor pelestarian, revitalisasi, transformasi dan pema-juan zamani masyarakat Dayak.

Yang dimaksudkan dengan kebudayaan di sini adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar, dengan tujuh unsur universal kebudayaan yaitu 1) sistem religi dan upacara keagamaan, 2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) bahasa, 5) kesenian, 6) sistem mata pencaharian hidup, dan 7) sistem teknologi dan peralatan. Kesenian hanyalah salah satu unsur dari kebudayaan.

Kebudayaan Dayak Zamani bersifat inklusif yang

dikembangkan adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Sedangkan sanggar tidak lain dari wadah dan sarana, tempat melakukan kegiatan kebudayaan secara sistematis dengan metode kerja *handep-hapakat* serta *harubuh*, unsur dari *pumpung-hai* dalam budaya Dayak, yang hari ini berkembang menjadi model *pen-tha-helix*, sebagai lanjutan dari Sakula Budaya. Handep-Hapakat akan berkembang kokoh karena prinsip saling asih, saling asah dan saling asuh menjadi dasarnya guna mencapai hidup bermartabat manusiawi.

Kebudayaan Dayak Zamani bersifat inklusif sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah kebudayaan Dayak, menunjukkan bahwa Dayak adalah mereka yang secara genealogis Dayak, selain itu juga mereka yang berkebudayaan Dayak dan yang senasib dengan Dayak.

Guna melaksanakan prinsip-prinsip dalam Preambule ini maka disusun Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Sanggar Budaya di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. ●●●



Herlison melantunkan syair-syair Karungut diiringi musik dengan menggunakan Kecapi/Sape. Foto Dok. Pritendie 2024

SANDÉHEN

Karungut Herlison, Mantir

Desa Sumur Mas

1. Balaku ampun baribu sémbah
Déngan Bapa Kepala Budaya je dumah
Mamparéndeng pingat nerus tampayah
Mampisik pényang budaya itah

**[Beribu maaf ampun kami minta
Ke Kadis Budaya yang datang serta
Menerangkan ingatan menjernihkan
pandang
Agar jiwa budaya kita terbangkit ulang]**

2. Balaku ampun barata-rata
Déngan pahari je tundah-kula
Isut ih béwéi taluh inyarita
Kapatut itah huang agama

**[Mohon ampun kepada semua
Kepada semua sanak-saudara
Ceritaku tak banyak sedikit saja
Sesuai kepatutan ajaran agama]**

3. Saritan agama je Kaharingan
Téras Pulau je Kalimantan
Rata najadi uras katawan
Panéngan Hatala katahian huran

**[Begini cerita Kaharingan
Jiwa pulau Kalimantan Siapapun
sebenarnya tahu la anugerah Tuhan dari
dahulu]**

4. Akan panuntut je Raja Bunu
Imberkat awi Hatala ngambu
Pétéh na jata kalang labéhu
Bapényang ménténg antang patahu

**[Sebagai turunan Raja Bunu
Yang diberkati Tuhan nun di atas
Pesan naga dari dasar lubuknya
Berjwalah serupa elang patahu]**

5, Itah nabélum huang Agama
Sama kilau manda huma
Lumpat kan hunjun tu manétei tangga
Manyampai kuasan a Ranying Hatala

**[Kita yang hidup sesuai agama Ibarat
naik masuk rumah Tiba ke dalam meniti
tangga Menuturkan kuasa Ranying
Hatala]**

Desa Sumur Mas, 2024.

PAHÉWAN & KALÉKA

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH

■ Oleh: Rama

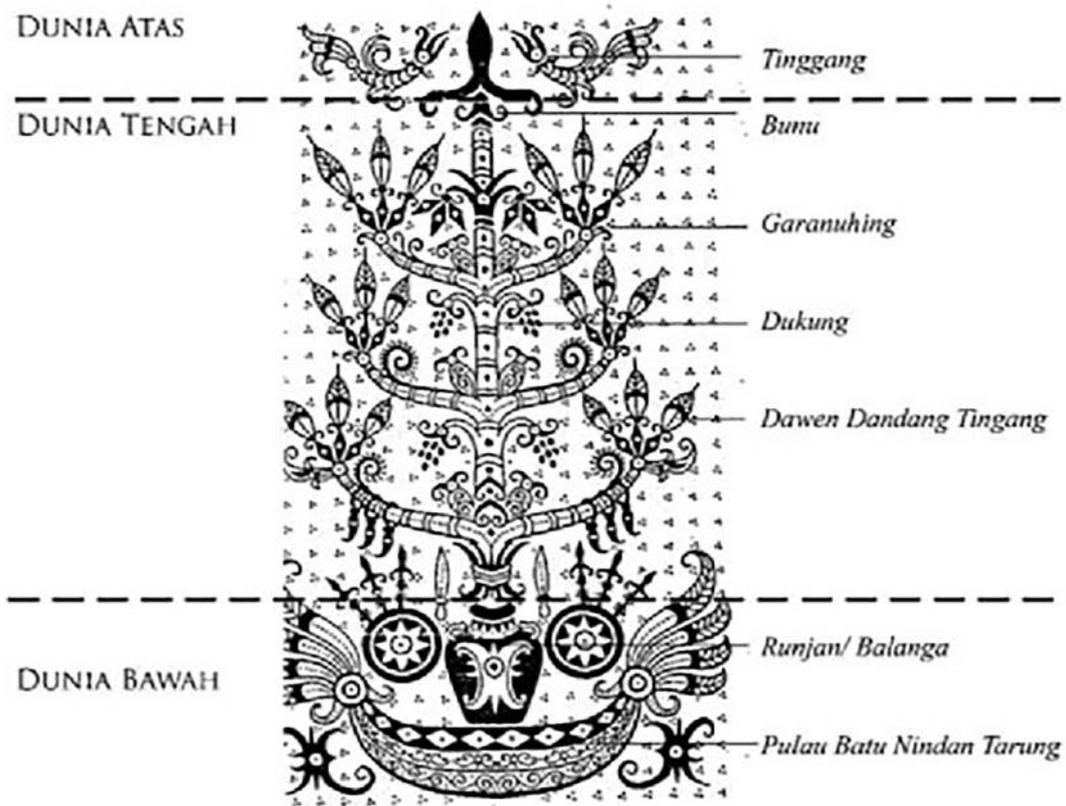
Salah satu wujud kearifan lokal dalam mengelola hutan adalah Pahewan, kawasan hutan lebat dengan pepohonan besar, baik yang terdiri dari satu jenis pohon seperti hutan tabelien (kayu besi) maupun hutan dengan berbagai jenis pepohonan yang dianggap keramat oleh masyarakat. Menurut keyakinan masyarakat Dayak, kawasan Pahewan tidak boleh diganggu karena akan melanggar wilayah pali (pantangan) yang dapat menyebabkan orang tersebut terkena penyakit atau celaka.

Namun, jangan sampai peribahasa di atas menjadi kenyataan bagi masyarakat Dayak, atau mungkin hal itu sudah terjadi? Pembukaan

hutan oleh perusahaan sawit di Kalimantan Tengah semakin marak terjadi, memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Hutan-hutan yang dahulu lebat kini berangsur-angsur berubah menjadi hamparan luas perkebunan kelapa sawit. Bahkan kebun karet yang telah lama menjadi mata pencaharian penduduk rela ditebang untuk memberi ruang bagi tanaman kelapa sawit. Proses ini tidak hanya memengaruhi bentang alam, tetapi juga memicu serangkaian masalah lingkungan yang serius. Penebangan dan kerusakan hutan merupakan dampak langsung dari perluasan perkebunan kelapa sawit ini. Ribuan hektar hutan yang sebelumnya men-

jadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan kini telah hilang, digantikan oleh deretan pohon kelapa sawit yang seragam.

Penebangan hutan di Kalimantan Tengah membawa dampak yang merusak pada kehidupan tumbuhan dan hewan. Selain itu, kerusakan hutan yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit menyebabkan penurunan kualitas tanah dan hilangnya fungsi penting hutan. Tanah yang sebelumnya subur menjadi rusak akibat penanaman pohon kelapa sawit yang seragam, yang tidak sebanding dengan keragaman tumbuhan di hutan alami. Pengikisan tanah meningkat, yang pada gilirannya mengakibatkan penu-



Sumber : www.wikipedia.com

runan kesuburan lahan dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Fungsi hutan sebagai penyerap polusi udara pun hilang, memperburuk masalah perubahan iklim dunia.

Tidak hanya itu, pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga memicu konflik sosial. Banyak masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah mereka, yang telah mereka huni dan kelola selama berabad-abad. Proses pembukaan lahan sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang

memadai dengan penduduk lokal, menyebabkan ketegangan dan perlawanan dari komunitas adat. Kehilangan tanah ini tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi mereka, tetapi juga mengancam warisan budaya dan tradisi yang telah terjaga selama ini. Banyak kasus di mana masyarakat lokal harus berhadapan dengan tindakan represif ketika mereka mencoba mempertahankan hak atas tanah mereka.

Lebih jauh lagi, mafia tanah dalam industri sawit juga mengancam keber-

lanjutan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Pembukaan lahan secara ilegal dan tidak berkelanjutan menyebabkan deforestasi yang cepat dan degradasi hutan yang serius. Hutan-hutan yang lebat dan kaya akan biodiversitas telah digantikan oleh hamparan perkebunan kelapa sawit yang monoton, meninggalkan jejak ekologis yang sulit untuk pulih.

Kearifan lokal masyarakat, yang sering disebut pengetahuan lokal, adalah salah satu wujud kebudayaan yang penting. Inti dari

kebudayaan ini adalah nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman etika dan moral, serta menginterpretasikan tindakan sesuai dengan kebudayaan setempat. Pengetahuan lokal ini tersembunyi dalam makna dan pesan yang diwakili oleh kata-kata, pepatah, ungkapan, nyanyian, semboyan dan literatur sastra yang tercermin dalam perilaku masyarakat Dayak dalam mengelola lingkungan alam mereka.

Dinamika pengelolaan hutan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah berakar dari konsep *Batang Garing*, sebuah simbol lingkungan hidup yang mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam. Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan hanya sekadar sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian alam demi kehidupan generasi mendatang.

Selain *Pahewan*, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga mengandalkan konsep *Kaleka* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam upaya menjaga dan melestarikan hutannya. *Kaleka*, yaitu tempat pemukiman leluhur

masyarakat adat yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal. Dari perspektif kehutanan, *Kaleka* adalah contoh nyata dari agroforestri yang dipraktikkan oleh masyarakat Dayak. Dalam praktiknya, membuka lahan untuk menanam padi dan sayuran, yang diiringi dengan penanaman berbagai jenis buah-buahan seperti durian, manggis dan langsung. Lahan yang sebelumnya merupakan hutan terbuka kemudian ber-suksesi sekunder menjadi hutan kembali, sementara tanaman-tanaman terse-

but berkembang menjadi kebun-kebun tua yang produktif.

Meskipun hutan-hutan di Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam keanekaragaman jenisnya, namun semakin terancam oleh penebangan dan kerusakan yang terus berlangsung. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mempertahankan dan melindungi tradisi kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga dan merawat hutannya. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki kearifan lokal dalam meles-



Pohon berusia ratusan tahun di Kaleka. Foto.Dok. Rama 2024



Pohon menjulang dengan timbunan daun di Kaleka. Foto.Dok. Rama 202

tarikannya, mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupannya. Masyarakat Dayak telah lama melakukan pola pertanian kehutanan dalam mengelola hutan sehingga hutannya tetap lestari. Pola pertanian kehutanan tersebut dikenal dengan Kaleka, yang telah menciptakan kebun-kebun tua yang turut berperan dalam menjaga keberagaman hayati yang khas.

Beberapa *Kaleka* yang masih terjaga hingga saat ini antara lain *Kaleka Bahun-du*, *Kaleka Jampure* di Desa Tumbang Oroi serta *Kaleka Bukit Gunar* di Desa Tum-

Pahewan berfungsi sebagai alat untuk memelihara dan mempertahankan keseimbangan kawasan serta memperkuat identitas kepemilikan menurut adat. Kawasan dengan nilai ekologi penting dan budaya sebagai identitas masyarakat harus dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih mendetail mengenai kawasan *Pahewan* dan *Kaleka* sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan peraturan daerah (Perda).

Di tengah ancaman penebangan hutan dan

kerusakan hutan akibat maraknya perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju, seperti konsep *Pahewan* dan *Kaleka*, menjadi benteng terakhir dalam menjaga dan melestarikan hutan. *Pahewan* dan *Kaleka* tidak hanya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi secara adat, tetapi juga sebagai penyangga terhadap kerusakan lingkungan dan pencegah kepunahan kehidupan tumbuhan dan hewan. Dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan tekanan industri, semangat kearifan lokal ini menjadi harapan bagi kelestarian hutan Kalimantan Tengah. Melalui perlindungan hukum dan penerapan peraturan daerah yang bijak, keberlanjutan lingkungan dan budaya Dayak dapat terjamin, menjadikan *Pahewan* dan *Kaleka* simbol kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi arus perubahan zaman.

Namun, kenyataannya *Pahewan* dan *Kaleka* belum cukup kuat untuk menahan laju ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ini sebagian besar disebabkan oleh kerangka hukum di Indonesia yang masih belum sepenuhnya mendukung. *Pahewan* dan *Kaleka* akan memiliki

bang Samui, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kini, kawasan *Pahewan* dan *Kaleka* dipahami oleh masyarakat sebagai kawasan konservasi yang dilindungi secara adat oleh masyarakat Dayak. Sebagai lahan konservasi, kawasan ini berfungsi sebagai penyangga kerusakan lingkungan dan mencegah kepunahan keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

Pahewan dan *Kaleka* mencerminkan konstruksi pengetahuan lokal yang digunakan untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut. Legenda-legenda memperkuat pemahaman masyarakat terhadap *Pahewan* sebagai hutan keramat, sementara *Kaleka* dijaga sebagai kebun adat. Hutan lindung dan kawasan adat memiliki makna yang sama dalam upaya konservasi, yang didukung oleh masyarakat setempat.

Model kerja sama dalam pengelolaan hutan dapat mencakup pemetaan zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan usaha masyarakat, termasuk upaya pemeliharaan kawasan. Pemahaman tentang *Kaleka* dan legenda



Yanto pemilik *Kaleka Sapi Matei*.
Foto.Dok. Sandra Mauk 2024

kekuatan lebih besar dalam melindungi dan menjaga hutan di Kalimantan Tengah jika mereka diakui sebagai bagian dari kawasan hutan adat. Namun, memperoleh status hutan adat bukanlah proses yang mudah. Proses ini memerlukan perjuangan panjang dan kompleksitas hukum yang rumit, mengingat pengakuan resmi hutan adat masih terhambat

oleh berbagai regulasi dan kepentingan yang saling bertentangan. Tanpa pengakuan ini, *Pahewan* dan *Kaleka* tetap rentan terhadap ancaman deforestasi dan degradasi hutan, menjadikan upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat Dayak menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus ekspansi perkebunan kelapa sawit. ●●●

FESTIVAL BUDAYA ISEN MULANG

Wawancara Pebri Ayu Lestari
dengan Kepala Bidang Kesenian
Disbudpar Provinsi, Sussy Asty



Foto.Dok. Michael Hendrico 2024

PROMOSI KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PRODUK UNGGULAN KALTENG

■ Oleh: Pebri Ayu Lestari

Saban tahun sejak tahun 1993, Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) diselenggarakan sebagai salah satu mata rangkaian dalam memperingati hari jadi Kalimantan Tengah (Kalteng) 23 Mei. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Provinsi Kalteng, sekarang dipimpin oleh Adiah Chandra melakukan gebrakan baru yang mem-

buat FBIM 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Di bawah motto The Power of Culture, sebuah konsep yang memandang bahwa semua budaya yang ada di Kalteng merupakan kekuatan dan kekuatan ini perlu dipersatukan dan di-dayagunakan, maka isi acara FIB yang berlangsung dari 17 sd 23 Mei 2024 diper-

kaya dengan Festival Kuliner Nusantara.

Perlu dicatat bahwa Festival Budaya Isen Mulang ini telah dimasukkan dalam Kharisma Event Nusantara serta Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (BBI) dan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) yang dipelopori oleh Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi



Foto: Orangutan sedang berendam di anak sungai Rungan, Palangka Raya di kawasan wisata Pulau Kaja. Dok BIT 2024

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Guna menelisik lebih lanjut kebaruan pada FIB dan Festival Kuliner Nusantara 2024 ini, Majalah Panutung Tarung menugaskan Pemimpin Redaksinya Pebri Ayu Lestari, untuk mewawancarai Adiah Chandra Sari, S.H., M.H., Kepala Dinas (Kadis) Dibudpar Provinsi Kalteng. Permintaan wawancara disambut hangat oleh Kadis. Karena mendadak Kadis mesti menghadiri berbagai rapat, beliau kemudian menugaskan Kepala Bidang Kesenian Dibudpar Provinsi, Sussy Asty, yang juga penanggungjawab penyelenggaraan FBIM dan Festival Kuliner Nusantara 2024 un-

tuk mewakili Kadis melangsungkan wawancara.

Berikut adalah wawancara tersebut. Pebri Ayu Lestari (PAL): **Kami menyampaikan terimakasih kepada Ibu yang telah menyediakan waktu menerima kami di tengah-tengah kesibukan Festival. Barangkali Ibu bisa menjelaskan secara singkat tentang apa gerangan Festival Budaya Isen Mulang dan mengapa Festival Budaya Isen Mulang tahun ini mengambil tema "The Power of Culture", apa tujuan dari kegiatan ini serta sejak kapan kegiatan ini diadakan?**

Sussy Asty (SA): Festival Budaya Isen Mulang ini merupakan festival terbesar

yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan tiap Kabupaten/Kota masing-masing memiliki festival tersendiri. Isen Mulang dalam Bahasa Dayak Ngaju memiliki arti "pantang mundur" dan masuk agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah menampilkan serta mempopulerkan keanekaragaman budaya se-Kalimantan Tengah yang dikemas dalam bentuk karnaval. ... Festival Budaya Isen Mulang ini dimulai dari tahun 1993 dan berlanjut sampai sekarang. Dalam Festival ini yang berlangsung setiap tahun, kita menampilkan budaya-budaya, kearifan lokal, seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah

yang bukan hanya budaya Orang Dayak saja. Peserta Festival Budaya Isen Mulang ini selain dari Kabupaten/Kota, ada juga peserta dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun dari umum (paguyuban dan sanggar seni yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah) tetapi tergantung pada lomba itu sendiri. Kekuatan Budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini menyatukan budaya kita, baik itu dari tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam satu rangkaian kegiatan. : Target dan tujuan pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang

yaitu: Sebagai ajang promosi dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata serta potensi dan produk unggulan masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menciptakan kesempatan bagi dunia usaha pengrajin untuk mempromosikan serta memasarkan produk kepada konsumen dan selanjutnya juga sebagai sarana promosi dan apresiasi seni dan budaya serta pesta rakyat sekaligus rasa syukur kepada Maha Pencipta.

Lomba perahu hias menyusuri Sungai Kahayan, salah satu acara yang ba-

nyak menarik perhatian masyarakat pada Festival Budaya Isen Mulang 2024.

PAL: Hal-hal apa saja yang diinginkan pemerintah dari masyarakat (Dayak dan non Dayak) dalam Festival Budaya Isen Mulang dan bagaimana faktanya?

SA: Semua rangkaian strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan Festival Budaya Isen Mulang tahun 2024 diarahkan sebagai ajang promosi kebudaya-



Foto: Produk unggulan anyaman rotan dikemas menjadi tas lanjung, tas, hingga tempat serba guna karya dari Desa Tumbang Mantuhe Kecamatan Manuhing Raya, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dok BIT 2024

yaan dan pariwisata serta potensi dan produk unggulan masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Tengah menciptakan bagi dunia usaha.

PAL: Segmen masyarakat mana saja yang menjadi sasaran Festival Budaya Isen Mulang?

SA: Sasaran pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang adalah masyarakat lokal, wisatawan domestik dan mancanegara, serta para investor dalam dan luar negeri serta menarik pergerakan atau kunjungan dari wisatawan domestik maupun manca negara selain dari masyarakat lokal yang ada, untuk promosi-promosi Festival Budaya Isen Mulang sudah dilakukan di website maupun sosial media, baleho, bandara yang ada di Jakarta dan bandara di Banjarmasin selain bandara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan menampilkan trailer pada saat sebelum mulai nonton film di XXI (21 Palangka Raya Mall) dan melibatkan juga media yang ada di Kalteng serta influencer.

PAL: Bagaimana Festival Budaya Isen Mulang ini

bisa menjadi media pengenalan potensi budaya dan pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah?

SA: Festival Budaya Isen Mulang setiap tahunnya menampilkan banyak sekali rangkaian kegiatan, pertunjukan, hiburan atraksi yang kita kemas baik itu atraksi dari sektor seni, budaya, kuliner, permainan tradisional (balugu dan bagasing), olahraga tradisional (bajukung dan besei kambé), kapal hias, dan ada pemilihan putra-putri pariwisata kemudian pawai budaya yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat, karena pada pawai budaya inilah masing-masing dari peserta.

PAL: Apa visi dan misi DISBUDPAR Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Festival budaya Isen Mulang, dan apa saja yang sudah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini?

SA: Visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang yaitu mengangkat serta melestarikan nilai-nilai budaya terutama yang ada di Kalimantan Tengah, mengang-



Foto: Penari asal Desa Tumbang Samui, Gur
Dok BIT 2024



ung Mas, Kalimantan Tengah.

kat kearifan lokal, dan juga memberikan kesempatan kepada para seniman atau pelaku seni untuk lebih kreatif didalam berkesenian. Secara umum Festival Budaya Isen Mulang sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari terselenggaranya berbagai kegiatan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang ditetapkan. Keberhasilan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kunjungan wisatawan atau pergerakan wisatawannya terbukti pada tahun 2023 kunjungan wisatawan melampaui target kunjungan sebanyak 1,8 juta kunjungan, apalagi Festival Budaya pada tahun ini bertepatan dengan UCI (Union Cycliste International) MTB Eliminator Word Cup 2024 yang diikuti oleh 60 negara walupun leading sector berbeda, dan perlu diketahui pada tahun 2022 Festival Budaya Isen Mulang pecahkan rekor MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) tradisi "Mangenta" peserta terbanyak, pada tahun 2023 "Tari Wadian Dadas/Bawo" dan pada tahun 2024 ini akan Kembali pecahkan rekor MURI yaitu "Tari Kolosal".

PAL: Pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan

kan melalui Festival Budaya Isen Mulang? Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah merancang pesan-pesan mengenai kesenian dan budaya di Provinsi Kalimantan Tengah?

SA: Pesan-pesan yang dirancang mengenai kesenian dan budaya Kalimantan Tengah dalam Festival Budaya Isen Mulang yaitu agar masyarakat lebih mencintai dan melestarikan budaya Kalimantan Tengah, "kalau bukan dari kita siapa lagi?" Karena ini merupakan jati diri sebagai orang Dayak. Fakta dan informasinya bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang beranekaragam disamping itu juga di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keanekaragaman flora dan fauna serta peninggalan objek sejarah, wisata dan kebudayaan yang khas.

PAL: Sekali lagi, terimakasih, Bu. Mengharap Ibu selalu sehat. Salam terimakasih juga kepada Bu Kadis.

SA: Terimakasih kembali. ●●●



Diskusi bersama Kelompok Tani mengenai pemasaran produk di Desa Tumbang Samui. Foto.Dok.Pritendie.2024

TENTANG PEMASARAN PRODUK UNIT USAHA KELOMPOK TANI DI MANUHING RAYA: PERTANIAN DAN PERIKANAN

■ Oleh: Pritendie & Michael Hendrico

Unit Usaha Kelompok Tani Kecamatan Manuhing Raya mencakup 7 lokasi yaitu 1 dusun, 5 desa, dan 1 kelurahan. Dengan dukungan program BIT, 16 unit usaha kelompok tani telah terbentuk, meliputi 3 unit usaha madu kelulut, 1 unit usaha kerajinan rotan, 1 unit usaha peternakan ayam broiler, 6 unit usaha pertanian, dan 5 unit usaha perikanan. Pembentukan unit usaha ini dilakukan bersama Dr. Wahyudi Wibowo sebagai konsultan

profesional dari Surabaya, yang membantu menganalisis pasar dan model bisnis unggulan untuk desa.

Analisis dilakukan dari sudut pandang marketing (pemasaran) dan branding (merek), dua komponen penting yang akan diterapkan pada unit usaha kelompok tani di Manuhing Raya.

Marketing adalah proses mempromosikan dan menjual produk atau jasa, mencakup riset pasar dan

periklanan. Tujuannya adalah menciptakan, mempertahankan, dan memuaskan pelanggan melalui strategi dan taktik yang tanggap pada tuntutan atau kebutuhan pasar, menciptakan nilai, serta membangun hubungan berkelanjutan.

Branding adalah proses menciptakan dan mengelola citra serta identitas unik produk, jasa, atau perusahaan. Branding bertujuan membedakan dari pesaing dan menciptakan persepsi

positif di benak konsumen, mencakup elemen visual dan nilai-nilai yang ingin disampaikan.

Perwujudan lebih lanjut Program ini, Borneo Institut sebagai lembaga pendamping melakukan intervensi bertahap berupa membagikan bibit jahé dan lombok lokal, di lima desa yaitu Tumbang Mantuhe, Putat Durei, Tumbang Samui, Tumbang Oroi, dan Luwuk Tukau. Sedangkan daerah yang belum diintervensi pada tahapan ini adalah Kelurahan Tehang dan Dusun Ulek Luwang.

Penggunaan bibit lokal dilakukan dengan maksud menjaga dan melestarikan benih alami daerah serta memperhitungkan kesesuaian antara benih dengan kondisi tanah dan cuaca setempat. Untuk maksud serupa maka Borneo Institut (Bit), sejak beberapa tahun ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga dari Jerman dan Norwegia, telah mendirikan Bank Benih di Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas.

Pada tahap sekarang, pendampingan Unit Usaha Kelompok Tani yang dilakukan oleh Bit masih berada pada tahap awal dan mengambil fokus utama pada penataan organisasi, belum pada tingkat menghasilkan produk, kecuali dalam Unit Usaha Pengrajin Ro-

tan yang produk-produknya sudah mulai terjual di daerah sekitar. Sedangkan Unit Usaha yang bergerak di bidang-bidang seperti madu kelulut, sirup jahé, dan abon ikan, produk-produk mereka masih berada pada tahap percobaan atau produk contoh (sample). Sebagai produk komoditas, mereka belum memiliki karakteristik serta target pasar yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki strategi pemasaran yang tepat agar produk tersebut berhasil dan tentu saja meningkatkan kualitas produk itu sendiri.



Menghargai hasil dari pertanian adalah menghargai akar dari kehiduoan kita sendiri



Berikut adalah beberapa saran strategi pemasaran yang efektif untuk produk Unit Usaha Kelompok Tani skala kecil, terutama di daerah terpencil.

(a) Memperkuat hubungan antar personal: Melalui interaksi tatap muka di pasar tradisional atau pameran, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

(b) Menggunakan Jaringan Sosial Lokal: Menciptakan dukungan dari komunitas setempat untuk mempromosikan produk secara langsung dari orang ke orang.

(c) Menampilkan Produk Secara Langsung: Menggunakan pasar mingguan atau pameran untuk memungkinkan konsumen melihat dan mencoba produk sebelum membeli, termasuk menyediakan sampel atau demonstrasi produk.

(d) Membangun Kerjasama Lokal: Bekerjasama dengan pebisnis lokal (seperti toko kelontong, rumah makan, pasar tradisional) untuk membuka saluran distribusi baru dan memperluas jangkauan pada sebuah produk.

Strategi ini disarankan guna meningkatkan visibilitas produk (Visibilitas produk adalah sejauh mana produk Anda dikenal oleh konsumen potensial dan mudah ditemukan oleh mereka saat mencari produk atau layanan yang Anda tawarkan), membangun hubungan dengan konsumen lokal, dan memperluas pasar di daerah terpencil. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan produk unit usaha kelompok skala kecil dapat meraih kesuksesan, baik dalam memperluas cakupan pasar lokal maupun potensial untuk dikenal di luar daerah mereka. ●●●



**“Melindungi
tanah kita berarti
menjamin
Kehidupan
bagi generasi
mendatang.”**